

KOMUNIKASI DIALOGIS LANDASAN MASYARAKAT DEMOKRASI

Prof. Dr. H. Suwardi Lubis, MS
 Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Kenyataan dibentuk lewat proses inter subyektivitas antar masing-masing peserta komunikasi. Dari interaksi inilah, bahasa sebagai struktur yang diobyektivikasi timbul. Namun jaringan dan pola komunikasi tidak lagi lewat "tatap muka" (face to face communication) tetapi sudah menjadi "komunikasi bermedia" (mediated communication). Masalah segera muncul karena media massa - kenyataannya - dimanfaatkan oleh berbagai kelompok sosial, termasuk pemerintah yang memiliki kepentingan yang berbeda telah menjadikan media sendiri sebagai alai "manipulatif", dan bersifat 'memihak'. Realitas atau peristiwa yang dikonstruksikan media menghasilkan pseudo-events (peristiwa rekaan) sehingga mendistorsi realitas itu sendiri. Akibatnya, komunikasi bersifat monolog, bukan dialog. Sifat komunikasi monolog ditandai dengan sifat pesan yang berpusat pada diri pribadi (self centeredness) melakukan tipu muslihat dalam pesan (deception); pesan diarahkan guna menciptakan dominasi dan eksploitasi terhadap semua khalayak; pesan komunikasi ditujukan guna memperoleh keuntungan (profit) sesuai dengan kehendakpelaku komunikasi. Alternatif jawaban masalah ini ialah bahwa orientasi komunikasi yang bersifat menolog harus diganti ke arah komunikasi dialogis. Dalam proses komunikasi dialogis orientasi komunikasi tidak lag; menitilberatkan: "penyampaian pesan kepada' tetapi proses "peuyampaian pesan bersama orang lain. Artinya, komunikasi untuk saling melakukan transaksi secara seimbang guna menciptakan makna realitas secara bersama-sama.

Klata Kunci: komunikasi dialogis, media massa

1. Pendahuluan

We are now witnessing and unprecedented phenomenon of societal transformation everywhere which can not be explained merely by orthodox political or economic theories of social change, demikian kata Mowlana dan Wilson (1989:XJ) dalam *The Passing of Modernity Communication and Transformation of Society*. Manusia dan produk budayanya baik dalam ideology, ilrnu dan teknologi agak sulit diramal. Inilah watak rnanusia yang selalu terbuka punya kemungkinan berubah.

Teori dan alat ukur apapun selalu bersifat reduksionistik yang kebenarannya

parsial belaka, dalam upaya melihat realitas yang demikian kompleks ini. Bias-bias dan distorsi akan selalu hadir jika seorang pengamat hanya bersandar pada satu asumsi leoretik tertentu dan mengabaikan aspek etik filosofi untuk mengembalikan segala persoalan secara radikal dan mendalam.

Halnya makna pembangunan, ia begitu banyak mengundang kata kernbar dan multimakna. Pembangunan sering dinisbahkan dengan modernisasi, westenisasi, perubahan sosial, pembangunan bangsa, industrialisasi. perubahan politik atau pertumbuhan ekonomi. Melakukan satu pilihan

terhadap salah satu terminasi, akan mengundang resiko subversi terhadap realitas sehingga ia terpenjara oleh sekat-sekat madzhab pemikiran (*School of thought*) tertentu. Pembangunan semakin kehilangan makna ketika ditarik ke dalam berbagai perspektif. Intinya menjadi berkeping-keping, terpecah ke dalam bagian-bagian yang sulit dipersatukan kembali. Kebenarannya tak lagi holistik tetapi partikularistik yang ditarik ke dalam berbagai perspektif.

Namun dilemma muncul ketika realitas ditarik ke dalam dua tilikan (1) filosofi-normatif; (2) teoretik-saintifik, Pandangan filosofi-normatif amat kritis melihat fakta karena dengan sekuat tenaga ingin melihat realitas di belakangnya (*beyond the reality*). Caranya bersifat spekulatif-dalam arti yang positif dan diktum-diktum kebenarannya bersifat teoretik-saintifik. Fakta dilihat dan pengamatan yang empirik (*empirical reality*) dan diktum-diktum kebenarannya bersifat riid dan operasional. Memilih salah satu dan alternatif dilemmatis ini akan mengundang resiko 'tidak terbukanya realitas' secara utuh dan rumit. Tetapi bagaimanapun orang harus melakukan pilihan.

Tulisan ini memberi sikap untuk memetakan pembangunan dalam perspektif komunikasi sebagai salah satu pilihan diantara berbagai perspektif yang ada. Masalahnya ialah (1) bagaimana komunikasi melihat realitas pembangunan; (2) isu-isu komunikasi apa dihadapi dalam *setting* pembangunan dewasa ini; (3) bagaimana dunia atau disiplin komunikasi memberi kontribusi terhadap masyarakat yang terus membangun ini?

2. Tinjauan Pustaka

Manusia Proses Yang Menjadi Pembangunan-jika ditilik dan perspektif komunikasi bisa dilihat sebagai satu proses komunikasi. Karena, makna komunikasi sendiri, menurut Mowlana dan Wilson, "*to make known*" (menjadi tahu) dan pembangunan berarti : "*to unfold*" (membentangkan). Karena ini pembangunan dan komunikasi bisa dimaknakan sebagai "*the unfolding of knowledge*" (membuka atau membentangkan pengetahuan). Singkatnya, kata Mowlana dan Wilson, Komunikasi dan pembangunan bisa dilihat sebagai "*a transformation from being to becoming*" (1989: 204).

Proposisi di atas sangat beralasan. Karena manusia adalah kemungkaan yang terbuka untuk meningkatkan dirinya lewat proses budaya. Proses budaya dilakukan manusia melalui aktivitas simbolik. Dan aktivitas simbolik inilah yang menjadi watak dasar eksistensi manusia. Tak heran jika Ernst Cassirer memandang manusia sebagai "*animal symbolistne*". Hidup manusia akan terkurung dalam batas-batas kebutuhan biologis dan kebutuhan praktiknya, tiada gerbang bagi dunia ideal yang dan berbagai sisi dijanjikan oleh agama, kesenian filsafat dan ilmu pengetahuan (198: 62).

Proses simbolik adalah usaha untuk memberi makna terhadap realitas yang disandari lewat bahasa. Di sini, manusia secara arbitrer menjadikan hal-hal tertentu untuk mewakili hal-hal lainnya, sehingga lahir makna-makna tertentu. Sedangkan proses pemaknaan mengandung tiga komponen. Pertama, simbol yaitu kata-kata yang mewakili kenyataan tertentu. Kedua, *reference* yaitu pikiran tentang obyek yang

dipersepsi. Ketiga, *referent* adalah obyek yang sebenarnya. Tiga komponen ini oleh IA. Richard disebut sebagai teori makna *semantic triangle* (K. Foss. A. Foss dan Trapp. 1985: 26). Selanjutnya, bahasa sebagai alat komunikasi, dibagi oleh Richard ke dalam dua kelompok fungsional. Pertama, penggunaan bahasa "*referential*" yang digunakan untuk melakukan diskursus-diskursus ilmiah. Kedua, pengguna bahasa "*emotif*" yang digunakan untuk mengekspresikan sikap dan perasaan (Shiller, 1969 50-6 1).

Lewat bahasa Referensial terususunlah akumulasi pengetahuan yang kemudian membentuk sa ins. Sedangkan sains melahirkan teknologi dalam suci praksis. Sementara. bahasa "*emotif*" melahirkan karya-karya sastra dan seni, termasuk filsafat dan agama. Kedua bentuk bahasa tersebut tidak mungkin lahir jika tanpa aktivitas simbolik yang intens dan berkesinambungan. Dengan kata lain karena aktivitas simbolik itulah wujud kebudayaan tampil memberi citra kemanusiaan. Lewat aktivitas simbolik itu pulalah manusia terus berada dalam proses "menjadi" (*becoming*) guna menyempurnakan produk budayanya ke puncak-puncak prestasi yang lebih tinggi. Agaknya dalam konteks inilah mungkin-mengapa Alfred Korzhvki menyatakan "Prestasi manusia bergantung pada penggunaan simbol-simbol" (Mulyana dan Rakbmat, 1990: 101).

3. Pembahasan

Komunikasi lahir lewat proses interaksi. Sedangkan proses interaksi melibatkan orang lain atau kelompok. Dari proses interaksi itulah manusia saling belajar dengan yang lainnya guna

memahami realitas hidupnya. Dengan demikian kenyataan itu sendiri dibentuk lewat proses inter subyektivitas antar masing-masing peserta komunikasi (*communicate*) saling membuka di satu sarna lain secara emphatik dan sirnpatik. Dan interaksi inilah, bahasa sebagai struktur yang diobyektivikasi timbul. Sedangkan bahasa dan kornunikasi sendiri merupakan: "*The central process by which inter subjective meaning can be constructed*" (Dissayanake, 1988: 51).

Manusia akan terus berada dalam proses "menjadi" - menurut sudut pandang fenomenologi - jika diantara manusia atau peserta komunikasi mengkonstruksi realitas dunianya secara bersama dan bersifat dialogis. Namun trend masyarakat yang tadinya berada pada posisi *Gemein schaft* segera berubah kompleks menjadi *Gesell schaft*. Jaringan dan pola komunikasi tidak lagi lewat "tatap muka" (*face toface communication*) tetapi sudah menjadi "kornunikasi bermedia" (*mediated communication*) dengan segala bentuk teknologi komunikasinya yang serba ragam. Masalah segera muncul karena a media massa - kenyataannya - dimanfaatkan oleh berbagai kelompok sosial, termasuk pemerintah yang memiliki kepentingan yang berbeda. Adanya unsur kepentingan yang berbeda. Adanya unsur kepentingan yang ada di balik operasi media, telah menjadikan media sendiri sebagai alat "manipulatif", dan bersifat 'memihak'. Realitas atau peristiwa yang dikonstruksikan media menghasilkan *pseudo-events* (peristiwa rekaan) sehingga mendistorsi realitas itu sendiri.

Mengapa media didistorsikan dan dirnmanipulasi? Sebab kata C. Wright

Mills (1959) : *"The mass media fulfill significant needs for the individual- to give him identity, aspirations, and techniques (or their realization and escape from the consequences of disappointed aspirations. All this permits the elite that controls the media to control the behavior of the mass"* (Gerald Zaltman. 1998:221).

Konglomerasi kekuasaan dan konglomerasi kekayaan - yang tumbuh sebagai kekuatan dan penekan pembangunan berusaha keras untuk memaparkan status quo. Semua kekuatan masyarakat baik yang berada di ormas, orpoJ keJompok profesi dan kelompok penekan lainnya, dibuat "mandul" lewat alur komunikasi yang searah dan tersentralisasi.

Akibatnya, komunikasi bersifat mono log, bukan dialog. Sifat komunikasi mono log kata Richard L. Johatmesen (1983 52 - 54) ditandai dengan sifat pesan yang berpusat pada diri pribadi (*self centeredness*) melakukan tipu muslihat dalam pesan (*deception*); pesan diarahkan guna menciptakan dominasi dan eksploitasi terhadap semua khalayak yang bisa mendetahilisasi keadaan; pesan komunikasi ditujukan guna memperoleh keuntungan (*profit*) sesuai dengan kehendak peJaku komunikasi. Lebih lanjut Richard Johannesen menyatakan komunikasi mono log sebagai berikut:

A person employing monologue seeks to command. coerse. manipulate, conquer. dazzle, deceive, or exploit. Other persons are viewed as 'things to he exploits solely for the communicator's self serving purpose, they are not taken seriously as persons. Choices are narrowed caters message, not on the audiences real needs. The core

values, goals, and policies espoused by the communicator are impervious to influence exerted by the receivers. Audience feedback is used only to further the communicator purpose (1983:53).

Teknik-teknik persuasi, propaganda dan pemberian informasi politik atau budaya "meminta petunjuk" adalah gambaran dominan proses komunikasi yang bersifat searah dan mono log. Suara media massa lebih didornmasi 'suara pejabat' daripada "suara rakyat" Darnpak komunikasi monolog telah melahirkan sejumlah masalah khususnya dalam pernbentukan budaya komunikasi politik masyarakat.

Berbagai gejala yang dipetakan di atas membawa satu kesimpulan bahwa pembangunan dalam perspektif komunikasi tidak memberi tempat yang sentral, setidaknya-tidaknya seimbang, kepada hak berekspresi untuk bersikap dan berpendapat secara terbuka kepada setiap kelompok di dalam masyarakat. akibatnya, inisiatif pembangunan tetap berada di tangan pemerintah. Sernentara anggota masyarakat pasif Kaalaupun aktif hal itu bersifat semu belaka, karena gerak aktivitasnya bukan dating dan kesadaran mereka, melainkan karena dimobilisasi dari "atas". Langkahnya kornunikasi dan "bawah" telah merurnbulkan krisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Krisis partisipasi menyebabkan tirnbulnya harnbatan-hambatan terhadap proses demokrasi politik dalam pembangunan.

Isyu tentang keterbukaan, demokratisasi dan debirokratsasi yang sering menjadi agenda berita di media massa agaknya, bisa (dipandang scbagai isyarat) bahwa hak

berkomunikasi dan kebebasan berbicara serta kesiapan untuk berbeda pendapat, merupakan titik perhatian bagi proses pembangunan mendatang. Isyarat ini tentu saja, membutuhkan kesiapan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk menyiapkan langkah-langkah operasional ke arah demokratisasi di segala bidang nanti. Kesiapan tersebut tidak saja menyangkut teknis konseptual yang kemudian diimplementasikan dalam satu kebijakan operasional, tetapi juga kesiapan tumbuhnya keberanian politik guna, mengubah orientasi etik dan filosofi yang melandasi perilaku komunikasi selama ini.

Tumbuh partisipasi dari "bawah" haruslah dijadikan fokus orientasi oleh para penentu pembuat kebijakan sebagai jaminan politik guna pengembangan demokratisasi dalam periode kebangkitan kedua pembangunan ini. Sebab, partisipasi merupakan esensi dan unsur tak terpisahkan dari kehidupan politik yang demokratis (Kousolas, 1979: 199). Tuntutan demokratisasi yang memberikan jaminan terhadap partisipasi dan semua pihak dalam bidang komunikasi telah melahirkan satu teori normatif media yang disebut dengan: *democratic-participant media theory* (Me Quail, 1978: 96). Usaha untuk mengembangkan media demokratis - partisipasi yang dewasa ini menjadi "main stream" di kalangan ahli komunikasi pembangunan. dilatarbelakangi oleh keenderungan kornersialisasi dan pernonopolian media yang dimiliki secara pribadi - baik oleh pihak konglomerat kekuasaan dan konglomerat kekayaan reaksi

terhadap sentralisasi dan brokers lembaga-lembaga siaran publik. Beberapa organisasi siaran publik dewasa ini sudah dipandang terlalu paternalistik, terlalu tanggap terhadap terkaitan politik dan ekonomi terlalu monolitik dan diproJesionalkan.

Jadi - demikian Me Quail; "*The central point of democratic participant theory lies within needs interest and aspiration of the receiver in a political society. It has to do with the right to relevant information, the right to answer back, the right to use the means of communication for interaction*" (1987: 97). Teori ini sangat menolak adanya keharusan media yang seragam, disentralisasi, mahal, sangat diprofesionalisasikan dan dikendalikan pemerintah.

Transfortasi keterbukaan yang dewasa ini diagendakan agaknya masih membuat "gamang" para komunikator politik baik yang ada pada basis politikus maupun basis profesional untuk menyambut momentum itu. Hal ini terjadi karena "aspirasi kebisuan" lewat rekayasa komunikasi yang sentralistik telah menenggelamkan "*the silence majority*" ke arah sikap yang tak berdaya secara kultural. : pas if dan apolitik.

4. Kesimpulan

Untuk menghadirkan media yang demokratis - partisipasi sebagai jawaban terhadap memontum keterbukaan dan demokratisasi, akan agak sulit dikembangkan jika kultur komunikasi politik tidak direkonstruksi ke arah yang lebih cocok *denganzeitgeis/* sekarang. Masalah ialah praktek komunikasi macam apa yang secara etik dan instrumental mampu mengantarkan masyarakat ke alam keterbukaan dan

demokrasi.

Alternatif jawabannya menurut saya ialah bahwa orientasi komunikasi yang bersifat menolong harus diganti ke arah komunikasi dialogis. Dalam proses komunikasi dialogis orientasi komunikasi tidak lagi menitikberatkan: "penyampaian pesan kepada" tetapi proses "penyampaian pesan bersama orang lain", Artinya, komunikasi untuk saling melakukan transaksi secara seimbang guna menciptakan makna realitas secara bersama-sama. Karena itu, komunikasi dialogis, menurut L. Johannesen dipandang sebagai : "*are more fully human, humane, and facilitative of self-fulfillment*" (1983: 46).

Selanjutnya Johannesen menyajikan beberapa karakteristik model komunikasi dialogis ini sebagai berikut : (1) *authenticity* yang menunjuk pada proses komunikasi yang berlangsung jujur, langsung pada isi pembicaraan tanpa manipulasi. (2) *confirmation* yaitu respon komunikasi tidak didasarkan atas kerangka pikir diri sendiri, melainkan lewat konstruksi dan pikiran menurut orang lain: (3) *presentness* yaitu keterlibatan yang total dan para peserta komunikasi. sehingga masing-masing aktif memberi kontribusi makna: (4) *spirit of mutuality* yaitu memandang lewat komunikasi bukan sebagai obyek yang bisa dimanipulasi. melainkan sebagai sesama "subyek", (5) *supportive psychological climate* yaitu menciptakan iklim kondusif dan perasaannya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Terakhir saya ingin mengutip Martin Buber 'dialog'. katanva, "bisa meningkatkan perkembangan pengetahuan. diri dan kepribadian'. Bukankah hasrat membangun diri dan

bangsa itu justru niat awal pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dissanayake, Wimal. 1988. *Communication Theory: The Asian Perspective*. Arnie, Singapore
- Foss, Sonja K. at al. 1985. *Contemporary Perspective on Rhetoric*. Waveland Press Inc., Illionis
- Johannesen, Richard L. 1983. *Ethic in Communication*. Weveland Press, Illionis
- Kousoulas, George D. 1979. *On Government and PoLitic*. Ducbury Press, Massachusetts
- Mowlana, Hamid and Wilson, Lowie 1. 1990. *The Passing of Modernity : Communication and Transformation of Cociety*. Longman, New York-London
- McQuail, Dennis, 1984. *Mass Communication Theory*. Sage Publication, London
- Mulyana, Dedy dan Rakhmat, Ialaludin 1990. *Komunikasi Antarbudaya*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Soesanto, Astrid S. 1990. *Komunikasi sebagai Matrantrasi Utama antara Pengendalian Msk dan Pengawas Sosial*, Jakarta
- Zaltman, Gerald (ed.). 1978. *Processes and Phenomena of Social. Change* Roebert E. Krieger Publishing Company, New York